

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. (2008). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggriawan, Prima Teddy dan Aldira Mara Ditta C.P., (2023), *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Arba, H. M. (2019). *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya. (2011). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)* Jakarta: Djembatan.
- Limbong, Bernhard, (2011). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Lubis, Solly M. (2006), *Diktat Kuliah Teori Hukum*, Maju Mandar, Bandung.
- Kurniawan, Y. (n.d.). *Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI dan SPI)*.
- Marzuki, Peter Mahmud (2016). *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group. Jakarta.
- Mudakir, Iskandar Syah. (2010). *Pembebasan Tanah Untuk Membangun Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Muwahid, M. (2020). *Hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*. Duta Media Publishing, Pamekasan.
- Nasution, Johan Bahder. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.

- Said, S. U., & Muchsin, S. D. N. (2015). *Hukum Pengadaan Tanah*. Setara Press, Malang.
- Sumardjono Maria, SW, (2009). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Sutedi, A. (2020). *Implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusriadi. (2010). *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Zakie, Mukmin. (2013). *Kewenangan negara dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Indonesia dan Malaysia* . Buku Litera, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Staatsblaad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Termasuk Lembaran-Negara No. 104 tahun 1960.)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2005.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1993.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975. Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Desember 1975.

Jurnal

Albar, M. A. (2019). Kepastian Hukum Pemberian Ganti Kerugian Tanah Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum, 1 Volume (2) Nomor 2*. h. 1-19

Angela, K., & Setyawati, A. (2022). *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 3, Nomor (3), h. 199-216.

Bastanta, A., & Sitabuana, T. H. (2024). Pemenuhan Asas Keadilan dalam Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Pemilik Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *UNES Law Review, Volume 6 Nomor (3)*, h. 8463-8471.

Nugroho, A. S. S. M. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor (2)*. h. 1-8

- Harahap, R. (2023). Kebijakan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan berlakunya undang-undang cipta kerja. *Al-Qisth Law Review*, Volume 7 Nomor (1), h. 88-131
- Iqsal Madani, S. (2021). Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 4).
- Manurung, S., Laksamana, R., Katon, P., Sekolah, P., Pertanahan, T., & Jl, N. (2021). Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder Di Kabupaten Gresik. In *Jurnal Tunas Agraria* (Vol. 2, Issue 1).
- Masturi, R. (2020). *Hakekat Keadilan Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 21, Nomor 2, h. 94-107.
- Pamungkas, Z. S. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kota Malang* (Study Kasus Pedagang Kaki Lima Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Volume 3, Nomor (2). h. 1-8.
- Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian sengketa ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Section Binjai-Pangkalan Brandan berbasis perlindungan hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 1 Nomor (4), h. 210-225.
- Rahmad Matsuri. (2021). *Hakekat Keadilan Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*.

- Rendrajaya, K. A. B. (2018). Pengaturan Hak Milik Atas Tanah Yang Dialihkan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Perlindungan Pemilik. *Kertha Patrika*, 40(01).
- Sa, L., Wicoro, A., Jurusan Manajemen, D., Ekonomi, F., A Wahab Hasbullah Tambak beras Jl Garuda No, U. K., & Jurusan Manajemen, M. (2022). *Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Jombang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima)* (Vol. 16, Issue 1).
- Sahara, W., Yamin, M., Zaidar, Z., & Kaban, M. (2023). *Ganti Kerugian Terhadap Pembebasan Lahan Proyek Pembangunan Irigasi Batang Bayang*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Hal. 343-354.
- Saputra, R. W. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Kasus Di Kuta Lombok Tengah).
- Salsabella, S., Widyastuti, V., Regulasi, K. K., Tanah, P., & Umum, K. (2024). *Pembaharuan Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Konsepsi Ganti Untung Article*. <https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.59>
- Sembiring, J., Nababan, R., Tarigan, P. J. B., Pinem, O. V., & Hasibuan, R. S. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Kepentingan Umum. *Jurnal Relasi Publik*, 2(1), 63-78
- Shailina, I. (2019). *Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 1/Pen. Konsy 2017/Pn. Rtg Tentang Konsinyasi*. Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hal. 1-65

- Silvianingtias, I., Budisetyowati, D. A., & Atmoko, D. (2023). *Analisis Yuridis Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Di Bawah 5 (Lima) Hektar (Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Sistem Penyediaan Air Minum (Ipa Spam) Regional Jatiluhur I)*. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Volume 8, Nomor (4), Hal. 5325-5338.
- Sudana, E. H., Gozali, D. S., & Yusran, A. (2022). *Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. *Notary Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, Hal. 49-62.
- Suhartoyo, S. (2021). Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol. *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 4 Nomor (2), h. 326-338.
- Supriyadi. (2021). *Rekonstruksi Kebijakan Pengadaan Tanah Dan Kompensasinya Guna Kepentingan Proyek Strategis Nasional*. UNIVERSITASISLAMISULTANAGUNG.
- Tamo, W. M. T., Waongan, A., & Roeroe, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Penerima Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *LEX CRIMEN*, Volume 11 Nomor (4). h. 1-12
- Taufan Budi Fariyanto. (2019). *Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Terminal Terboyo Di Tinjau Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan PKL*. Skripsi, Universitas Semarang. Hal. 1-70
- Tohari, C. (2019). *Analisis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pemberian Ganti Rugi Atas Proyek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan*

Umum Perspektif Hukum Islam. Hukum Islam, Volume 18, Nomor (1), Hal. 58-77.

Umami Habsyah, Hartana Hartana, & Dewi Iryani. (2024). Tanggung Jawab Hukum Penilai Publik Untuk Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Berkepastian Hukum. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(5), 330–344. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.441>

Wibowo, M. K. B. (2019). *Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam*. *Mamba'ul'Ulum*, Volume 2, Nomor (2), Hal. 27-44.

LAIN LAIN

Agustin, W. (2017). *Pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum menurut fatwa majelis ulama indonesia nomor 8/munas vii/mui/12/2005 (studi kasus pembuatan jalan baru di desa sei muka kecamatan talawi kabupaten batubara)*. Disertasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hal. 1-74.

Inagatha Setyarahma Pangastuti. (2022). *Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Alun-Alun Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Al Maşlahat Al Mursalah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hal. 1-122.

Isnaini, Maulida. (2022). *Problematika pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembayaran ganti rugi hak atas tanah hak milik masyarakat : studi kasus pembangunan jalan tol Semarang-Batang di Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Semarang*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hal. 1-53.

- Perdana, F. (2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Hal Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan. Pengadilan Nomor : 5/Pdt.G/2018/Pn.Kag)*, Hal. 1-80
- Pradana, A. K. (2018). *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Berkeadilan*. (Disertasi, Universitas Brawijaya). Hal. 1-122.
- Prabandari, L. N. D. S., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2021). *Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum*. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3 Nomor (1), Hal. 1-5.
- Rara, R. (2022). *Analisis Fiqih Siyasah Tentang Mekanisme Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan BendunganTiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan)*. Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hal. 1-111
- Roni, M. (2021). *Keberatan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang Di Kabupaten Tegal S* Disertasi , Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Hal. 1-111
- Silalahi, R. N. (2022). *Tinjauan Yuridis Proses Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Pelabuhan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara*. Disertasi Universitas Medan Area. hal. 1-108.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2024.